



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Jln. Tanjung Ria No. 98 Base "G" Telp. 0967-541248 Fax. 0967-541045

Website: www.pt-jayapura.go.id E-mail: ptjayapura@yahoo.co.id

JAYAPURA - PAPUA

INSTRUKSI

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Nomor : 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) SECARA ONLINE

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Berdasarkan hasil monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri se Provinsi Papua dan Papua Barat per tanggal 8 Oktober 2018, ternyata masih banyak wajib lapor yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN, sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1254/BP/HM.01.1/6/2018 perihal Kepatuhan Pelaporan LHKPN, dengan ini memberi instruksi

Kepada:

1. Seluruh Wajib Lapor LHKPN

Pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri se Provinsi Papua dan Papua Barat

2. Para Ketua Pengadilan Negeri

Se Provinsi Papua dan Papua Barat

Untuk:

KESATU : Seluruh wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan agar segera melakukan pelaporan secara online melalui portal e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alamat situs <https://elhkpn.kpk.go.id> dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

KEDUA : Kepada para Ketua Pengadilan Negeri diinstruksikan agar memastikan bahwa dalam tengang waktu tersebut pada diktum kesatu, seluruh wajib lapor yang berada dalam jajarannya telah melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN;

KETIGA : Wajib lapor dan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak mengindahkan instruksi ini, akan menjadi pertimbangan dalam memberikan Penilaian Prestasi Kerja dan/atau usul mutasi/promosi;

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab

Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ini berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di: Jayapura
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018
KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA


SETYAWAN HARTONO, SH. MH. 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI